

**UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN PLN DALAM
MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Nita Ayu Oktaviana, Dr. Iwan Permadi,SH.MH, Tunggul Anshari SN,SH.MH

Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya

Email : L1713ta@yahoo.com

Abstrak

Penerangan jalan merupakan salah satu faktor penunjang untuk masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Penerangan jalan dikatakan penunjang karena tanpa adanya penerangan jalan masyarakat akan sulit dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Yang dikatakan penerangan jalan tidak hanya keberadaan listrik dipinggir jalan sebagai penerang jalan saja, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik untuk segala kepentingan masyarakat umum yang merupakan fasilitas umum. Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan yaitu penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah pengguna tenaga listrik. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban atau tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Kata kunci : Pajak Penerangan Jalan

Abstract

Street lighting is one of the supporting factors for the community to achieve a better life ahead. Information supporting dikatankan road without street lighting for the community would be difficult in doing their activities daily basis. That said street lighting not only the existence of the edge of the road as electric street lights in it, but all things relating to electricity for all in the public interest that the public facilities . Road Tax Information collected taxes on the use of

electricity. Self-generated electricity covers the entire power plant. Exempted from Taxes object description that is road electric energy consumption by government agencies , the Provincial Government and Local Government and the use of self-generated electricity with a certain capacity that does not require permission from the relevant technical agencies . Subject Lease Description Road is a private person or body that can use electricity . Description Taxpayers Road is a private person or body that uses electrical energy . In the case of electricity provided by other sources , the Road Information Taxpayers are users of electricity. Description Road Tax policy is the imposition of Value Sales of Electric Power . The sale of electricity is set in the case of electricity derived from other sources of payment, the sale of electricity is the amount of the charge or load fee will be added to the application fee kwh / variables that were charged on electricity bills in the case of self-generated electricity , the sale of electricity calculated based on available capacity , the level of electricity consumption , electricity consumption period , and the unit cost of electricity that occurs in the district .

Keyword : *Street lighting tax*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah, suatu daerah di tuntut untuk membiayai kegiatan di daerahnya melalui optimalisasi pendapatan asli daerah di antaranya adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi suatu daerah dalam penyelenggaraan daerahnya. Disini khususnya kota Malang yang kegiatan ekonominya cukup maju karena merupakan kota terbesar ke dua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang memiliki potensi yang baik dari segi pajak daerah karena kota ini merupakan kota pendidikan sekaligus kota wisata.

Pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, memiliki berbagai sumber yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dengan dilakukannya pemungutan pajak daerah di kota Malang. Didalam pemungutan pajak daerah tersebut dapat memberikan manfaat dalam daerahnya untuk pembangunan di daerah tersebut.

Penetapan jenis jenis pajak kabupaten dan kota telah di undangkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kota Malang telah menetapkan perda yang mengatur tentang pajak daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pada era sekarang peningkatan dan kemajuan teknologi menyebabkan masyarakat berupaya untuk hidup lebih baik dan lebih maju untuk memperoleh status sosial dan kehidupan yang lebih maju. Yaitu dimana harus ada penunjang untuk mencapai kehidupan yang lebih maju misalnya penerangan jalan.

Penerangan jalan merupakan salah satu faktor penunjang untuk masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Penerangan jalan dikatakan penunjang karena tanpa adanya penerangan jalan masyarakat akan sulit dalam melakukan aktifitasnya sehari hari. Yang dikatakan penerangan jalan tidak hanya keberadaan listrik dipinggir jalan sebagai penerang jalan saja, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik untuk segala kepentingan masyarakat umum yang merupakan fasilitas umum.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dasar hukum pajak penerangan jalan kota Malang adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan. Diharapkan pajak penerangan jalan tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Ini sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tersebut Pemerintahan Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah mengawasi proses pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ini harus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul. Namun dalam hal pengelolaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah berkerjasama dengan PLN dalam pemungutan pajak penerangan jalan yang dimana peran PLN dalam hal ini PLN wajib menerima dan menyetor pajak penerangan jalan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Dasar

hukum pemungutan pajak penerangan jalan selain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 adalah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 Kota Malang tentang Pajak Penerangan Jalan, pasal 4 yang isinya yaitu dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Serta bagaimana upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN, sehingga dapat melaju dengan pesat peningkatannya dan sangat berperan dalam pendapatan pajak daerah di kota Malang. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti adalah upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN terhadap pendapatan asli daerah di kota Malang. Serta, hambatan apa yang dihadapi PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN dan solusinya ?

2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai yaitu mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLN terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Malang, karena pendapatan terbesar dari seluruh sektor pajak daerah atau

kabupaten kota Malang adalah pajak penerangan jalan. Oleh karena itu untuk mengetahui upaya dan faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan pendapatan pajak penerangan jalan sehingga pajak penerangan jalan menjadi sektor pajak daerah yang realisasi pendapatannya terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Serta, mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi PLN dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN di kota Malang dan bagaimana solusinya terhadap hambatan yang dihadapi oleh PLN.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Dalam metode penelitian hukum dikenal ada dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum, sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu meninjau masalah yang diteliti dan mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam Implementasinya.² Disini penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan melakukan analisa tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di kota Malang. Peneliti hendak meneliti bagaimana upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN untuk meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di kota Malang.

2. Metode Pendekatan

¹ Peter Mahmud Marzuki, , **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

² Ronny Hanitijo Soemitro, , **Metode Penelitian Hukum dan jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. Halaman 65.

Penulis akan melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis.³ Dalam hal ini pendekatan bertujuan untuk melakukan analisis dan mendeskripsikan upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan pendapatan asli daerah sesuai dengan PERDA No.09 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dan PERDA No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dan PLN untuk meningkatkann kontribusi penerangan pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah di kota Malang yang telah di atur dalam PERDA No.09 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dan PERDA No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Jenis dan Sumber Data

Data Primer, yaitu Data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan.⁴ Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang dianggap penulis, orang yang mengerti tentang isi permasalahan tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN terhadap pendapatan asli daerah di kota Malang.

Data Sekunder, yaitu Data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundangan undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁵ Data sekunder mendukung data primer yang ada di lapangan yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berkaitan

³ Ronny Hanitijo, , Metode Pendekatan Hukum, Cetakan IV, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta.

⁴ Joko P, , **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineke Cipta, Jakarta, 1997. halaman 34.

⁵ Soerjono Soekanto dan Siti Mamuji, **Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 1982. halaman 14.

dengan mengenai upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN terhadap pendapatan asli daerah di kota Malang.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung. Teknik wawancara ini menggunakan metode bebas terpimpin yaitu sebelum memulai wawancara terlebih dahulu mempersiapkan point-point yang akan dibahas dalam wawancara.
- b) Studi Kepustakaan, yaitu penulis akan melakukan kegiatan penelusuran data dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dikaji didalam penelitian ini.
- c) Pengamatan atau Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung pada sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini untuk dapat menarik kesimpulan setelah dilakukanya observasi.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi⁶ yang akan diambil dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan beberapa pegawai PT.PLN (Persero) APJ Malang.

b) Sampel

Sampel⁷ atas penelitin ini dilakukan berdasarkan teknik non-random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Dimana penulis memilih subyek-subyek dari anggota populasi , yaitu pihak-pihak yang mengetahui masalah yang dikaji. Dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan Daerah kota Malang adalah Kasubag Umum dan pihak PLN Kota Malang antara lain

⁶ Bambang Sunggono, , Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. halaman121. populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi wilayah terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karekteristis tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi maknanya berkaitan dengan elemen, yaitu unit tempat diperolehnya elemen tersebut dapat berupa individu keluarga, kelas, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, organisasi dan lain-lain.

⁷ Margono Sukardjo, , Metode Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta,2004. halaman.118. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Artinya tidak ada nada sampel jika tidak ada populasi. Sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristikm populasi dan harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang harusnya diukur.

bagian SDM, Spv.Pelayanan Pelanggan, Manajer AreaPT. PLN (Persero) APJ Malang.

c) Responden

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁸ Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kasubag Dinas Pendapatan Daerah Malang 1 orang
2. Manajer Area PT.PLN (Persero) APJ Malang 1 orang.
3. Asmen Pelayanan dan Administrasi 1 orang
4. Spv. Pelayanan Pelanggan 1 orang
5. Bagian SDM (Sumber Daya Manusia) 1 orang

C. PEMBAHASAN

1. Upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Malang.

Pajak Penerangan Jalan ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemungut pajak penerangan jalan dilaksanakan dengan cara *with holding system* dengan PLN sebagai wajib pungut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Bab II, Pasal 4 ayat 1 yang berisi PLN wajib menyetor hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pasal 4 ayat 2 berisi Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 kota Malang tentang Pajak Penerangan Jalan, pasal 4 berisi dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN yang menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah mengawasi dan memantau terhadap

⁸ Suharsimi Arikunto, , **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka cipta, Jakarta,2002. halaman 107.

penerimaan dan penyetoran pajak penerangan jalan ke kas daerah. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang diatur dalam keputusan menteri dalam negeri dan peraturan daerah ini hanya pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. Oleh karena itu, Pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan dengan *with holding system* dengan PLN sebagai wajib pungut.⁹

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 Kota Malang tentang Pajak Penerangan Jalan secara singkat dapat digambarkan bahwa Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan cara *with holding system* dengan PLN dari seluruh pelanggan di daerah yang bersangkutan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik PLN, kemudian oleh PLN hasil Pajak Penerangan Jalan disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pemerintah kota wajib melunasi pembayaran rekening listrik atas lampu penerangan jalan umum yang menjadi beban Pemerintah kota. Semua mekanisme tersebut dilakukan sesuai dengan *Momorandum of Understanding (MOU)* antara Pemerintah kota dan PLN.¹⁰ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan yang telah disesuaikan didalam Undang-Undang dan Perda tersebut hanya tarif paling besar pengenaan pajaknya, yaitu pengenaan pajak dari tiap-tiap subjeknya tidak melebihi dari tarif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Perda, bisa lebih kecil dari tarif pajak yang telah diterapkan dalam peraturan tersebut.

⁹ Hasil wawancara dengan Ni Kadek Yuni Diansari, Kasubag Umum Dinas Pendapatan Daerah kota Malang tanggal 27 November 2013.

¹⁰ Gede Suarnaya, **Pajak Penerangan Jalan**, (online), <http://gedesuarnaya.com/2011/10/03/311/> , (31 desember 2013) , 2011.

Kontribusi yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN adalah Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini hanya mengawasi, membantu dan berkerjasama dengan PLN saja dalam penerimaan dan penyetoran pajak penerangan jalan karena sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan pasal 4 yang berisi dalam hal tenaga listrik yang disediakan oleh PLN pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Oleh karena itu yang sangat berperan besar adalah PLN bila dilihat dari perolehan Pajak Penerangan Jalan dari tahun ketahunnya yang dapat memberikan sumbangan yang sangat besar untuk kas daerah di kota Malang.¹¹ PLN dalam meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan telah berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang berlaku.

Upaya yang dilakukan PLN untuk memperbanyak jumlah pelanggan listrik dengan cara memasarkan dan mendistribusikan listrik kedaerah-daerah yang belum terjangkau listrik atau daerah-daerah dalam tahap pembangunan misalnya, perumahan perumahan baru, rumah toko, perkantoran dan lain sebagainya agar daerah tersebut menggunakan listrik untuk penerangan yang secara tidak langsung dengan menggunakan listrik kita juga telah membayar pajak penerangan jalan, yaitu membeli token (pulsa listrik) untuk pelanggan yang menggunakan listrik Prabayar dan membayar rekening listrik yang menggunakan listrik Pasokan Bayar. PLN tidak hanya memasarkan pemasangan listrik tapi juga mempromosikan untuk penambahan daya dimasyarakat, penambahan daya yang telah ditetapkan oleh PLN dengan melayani penambahan daya untuk pelanggan-pelanggan PLN.¹² Adanya program seperti itu banyak masyarakat yang menambah daya, sehingga dengan masyarakat menambah daya secara langsung pajak penerangan jalan juga bertambah. Dapat memberikan keuntungan bagi pembangunan daerah setempat. Pajak Penerangan Jalan secara langsung

¹¹ Hasil wawancara dengan Agung Surana, Manajer Area PLN APJ Malang, diolah tanggal 16 Desember 2013

¹² Hasil Wawancara dengan Spv. Pelayanan Pelayanan Pelanggan, Priyanto.Malang, diolah tanggal 21 Desember 2013

(*otomatis*)¹³ disetorkan ke kas daerah dengan cara pelanggan PLN atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN membayar rekening listrik dan secara langsung telah membayar pajak, pada tiap-tiap rayon hingga PLN pusat menyetorkan kepada PLN Distribusi yang kemudian PLN Distribusi yang menyetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah dimasing-masing daerah untuk kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Kepala Daerah. Selain itu, PLN memberikan kontribusi terhadap fungsi pajak. Fungsi pajak yang telah diketahui umum, bahwa fungsi pajak bukan hanya anggaran saja, yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara, melainkan masih ada yang lain, yaitu fungsi mengatur. Dalam fungsi pajak tersebut pajak haruslah ditujukan kepada usaha untuk semata-mata dapat menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunaikan tugasnya. Maka dari itu, pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang daripadanya.¹⁴

Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2009-2012

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan PPJ	Biaya Operasional 5%	Jumlah PPJ disetor
1.	2009	22.854.663.475	1.142.733.174	21.711.930.301
2.	2010	24.227.867.107	1.211.393.355	23.016.473.752
3.	2011	26.929.800.798	1.346.490.040	25.583.310.758
4.	2012	29.463.919.435	0	29.463.919.435

Keterangan: Biaya Operasional pada tahun 2012 dihapuskan

Sumber : Data Sekunder, diolah 2013

Daftar tunggu dan tambah daya listrik kota Malang di bulan November 2013

¹³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), online , (24 Desember)

¹⁴ R.Santoso Brotodiharjo, , **Pengantar Ilmu Hukum Pajak** , Jakarta, Refika Aditama, 2010. halaman 211

		JUMLAH DAFTAR TUNGGU AKHIR			
		PASANG BARU		TAMBAH DAYA	
		PLG	KVA	PLG	KVA
1.	Rayon Blimbing	65	169,15	5	403,50
2.	Ragyon Kebon Agung	0	0	2	114,20
3.	Rayon Dinoyo	97,70	2.349,85	12,70	196,40
4.	Malang Kota	0 0		2	174,30
JUMLAH		162,70	2.519	21,70	888,40

Keterangan :

1. PLG : Pelanggan
2. KVA : Kilo Volt Ampere

Sumber : Data Sekunder,

diolah 2013

Daftar tunggu dari pemasangan listrik baru bagi para pelanggan baru merupakan salah satu hasil dari upaya PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak dari Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Malang. Jumlah pelanggan baru yang memasang listrik secara langsung dapat memberikan kontribusi terhadap pajak dan tergantung pada tiap-tiap golongan dari subjek pajaknya. Upaya yang dihasilkan tidak hanya pemasangan listrik baru saja tetapi juga penambahan daya dari para pelanggan PLN yang ingin menambah daya, para pelanggan yang menambah daya secara langsung juga akan bertambah pajak yang dikenakan sesuai dengan daya yang diinginkan oleh pelanggan dan untuk pemungutan pajaknya sesuai dengan peraturan yang ada besarnya pungutan pajak tersebut sesuai dengan kemampuan, daya dan golongan dari pelanggan tersebut. Agar dalam pengenaan pajaknya tidak merugikan pelanggan dan salah sasaran pemungutannya.

2. Hambatan yang dihadapi PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN di kota Malang dan solusinya.

Kesalahpahaman masyarakat yang mengira membayar pajak penerangan jalan sudah dapat memasang lampu secara ilegal yang sudah jelas merugikan pihak Pemerintah Kota Malang sendiri dan PLN tentunya. Selain itu, adapula pelanggan yang tidak menyelesaikan pembayaran rekening listrik yang biasanya disebut tunggakan para pelanggan PLN tersebut secara langsung menghambat peningkatan pajak¹⁵ dikarenakan merugikan sekali untuk biaya energi listrik yang telah dikeluarkan dan pemungutan pajaknya. Berikut adalah daftar jumlah tunggakan para pelanggan PLN Malang kota yang merupakan faktor penghambatnya. tunggakan para pelanggan PLN Malang kota yang merupakan faktor penghambatnya.

Tabel VIII. Jumlah Tunggakan pelanggan PLN Malang Kota dari Bulan Agustus sampai Bulan November 2013.

Rayon		Jumlah Tunggakan	Bulan
1	DINOYO	18.692.219.542	AGUSTUS
2	BLIMBING	14.129.725.998	
3	KOTA	19.696.845.391	
4	KEBONAGUNG	11.515.160.349	
1	DINOYO	20.034.478.566	SEPTEMBER
2	BLIMBING	15.429.433.958	
3	KOTA	20.573.610.108	
4	KEBONAGUNG	12.954.199.983	
1	DINOYO	21.407.588.549	OKTOBER
2	BLIMBING	16.283.792.812	
3	KOTA	21.988.708.421	
4	KEBONAGUNG	13.585.859.014	

¹⁵ Hasil wawancara dengan Agung Surana, manager area PT.PLN (Persero) APJ Malang , pada tanggal 17 Desember 2013

1	DINOYO	22.112.853.515	NOVEMBER
2	BLIMBING	16.462.341.481	
3	KOTA	22.158.090.092	
4	KEBONAGUNG	13.904.070.096	

Sumber : Data Sekunder, diolah 2014

Keterangan:

Jumlah tunggakan berasal dari seluruh golongan pelanggan yaitu,

1. Rumah tangga
2. Sosial
3. Bisnis
4. Industri
5. Pemerintahan

Banyaknya tunggakan tagihan rekening listrik yang tidak dibayar oleh pelanggan PLN mengakibatkan penerimaan pajak tidak sesuai target, hal ini merupakan penghambat dari penerimaan pajak. Akibat adanya tunggakan pembayaran listrik lampu penerangan jalan, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Malang dan masyarakat tentunya. Hal ini penting, tidak saja karena akan menyebabkan diputusnya lampu-lampu penerangan jalan, tetapi juga menyangkut hal yang lebih besar yaitu penggunaan uang Pajak yang tentu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

Solusi dari hambatan-hambatan yang dialami oleh PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN yaitu, diharapkan Pemerintah mendata kembali jumlah lampu penerangan jalan yang ada di seluruh Kota Malang. Hal tersebut dimaksudkan agar data lampu penerangan jalan yang menjadi beban Pemerintah Kota sesuai dengan kondisi nyata lapangan.

Lampu penerangan jalan liar pun bisa terdata dan bisa diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Anggaran bisa digunakan secara efisien untuk membayar semua tagihan sesuai alokasi rata-rata

tagihan PLN per bulan. Diharapkan tidak ada lagi, tunggakan dan anggaran yang terkuras habis hanya untuk membayar tambahan tagihan lampu penerangan jalan liar.

Beberapa solusi untuk menangani hambatan tersebut diantaranya :

1. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar listrik tepat waktu.
2. Melakukan pemutusan sementara bagi pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran listrik 1 bulan.
3. Melakukan pengawasan bagi para pelanggan yang telah diputus sementara.
4. Melakukan pembongkaran bagi para pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran listrik 3 bulan.
5. Memperbanyak agen pembayaran.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yaitu mempromosikan untuk penambahan daya dan memperbanyak jumlah pelanggan listrik dengan cara memasarkan dan mendistribusikan listrik kedaerah-daerah yang belum terjangkau listrik atau daerah-daerah dalam tahap pembangunan misalnya, perumahan perumahan baru, rumah toko, perkantoran dan lain sebagainya.
- b) Hambatan yang dihadapi PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sendiri terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu ketidak pahaman masyarakat yang mengira jika membayar listrik secara langsung telah membayar pajak itu bisa memasang lampu secara liar atau ilegal, serta banyaknya tunggakan tagihan rekening listrik yang tidak dibayar oleh pelanggan PLN.

2.Saran

- a) Diharapkan Pemerintah Kota mendata kembali jumlah lampu penerangan jalan yang ada di seluruh Kota Malang. Hal tersebut dimaksudkan agar data lampu penerangan jalan yang menjadi beban Pemerintah Kota sesuai dengan kondisi nyata dilapangan. Lampu penerangan jalan liar pun bisa terdata dan bisa diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Anggaran bisa digunakan secara efisien untuk membayar semua tagihan sesuai alokasi rata-rata tagihan PLN per bulan. Diharapkan tidak ada lagi, tunggakan dan anggaran yang terkuras habis hanya untuk membayar tambahan tagihan lampu penerangan jalan liar.
- b) Pemerintah kota Malang segera mengambil langkah cepat untuk membantu PLN sosialisasi kepada masyarakat agar menyelesaikan tunggakan tagihan rekening listrik. Karena, dalam hal pemungutan pajak penerangan jalan tahapan awal hingga penyetoran ke kas daerah dilakukan oleh PLN. Sebaiknya Pemerintah Daerah ikut membantu dalam apabila PLN mengalami hambatan dalam proses pemungutan pajak penerangan jalan tersebut. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum dilunasi maka PLN akan mengenakan sanksi tegas berupa pemutusan listrik. Alih-alih penagihan tunggakan pembayaran listrik digunakan untuk membiayai perbaikan jalan dan sekolah, karena Kas Daerah akan kembali digunakan untuk membayar biaya sambungan baru. Daripada untuk itu sebaiknya digunakan untuk hal yang lebih penting lainnya.

Daftar Pustaka

Buku :

Adrian Sutedi,S.H.,M.H., , **Hukum Pajak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

halaman 29.

Bambang Sunggono, , **Metodelogi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2002. halaman 121.

Joko P, , **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineke Cipta,

Jakarta, 1997. halaman 34.

Margono Sukardjo, , **Metode Penelitian Pendidikan**, Rineka Cipta,

Jakarta, 2004. halaman.118.

Peter Mahmud Marzuki, , **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta, 2009.

R.Santoso Brotodiharjo, , **Pengantar Ilmu Hukum Pajak** , Jakarta,

Refika Aditama, 2010. halaman 211

Rochmat Soemitro, , **Asas dan Dasar Perpajakan**, Eresco, Bandung,

1992.

Ronny Hanitijo Soemitro, , **Metode Penelitian Hukum dan jurimetri**,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. Halaman 65

Ronny Hanitijo, , **Metode Pendekatan Hukum**, Ghalia Indonesia,

Jakarta,1998.

Soerjono Soekanto dan Siti Mamuji, **Penelitian Hukum Empiris Suatu**

Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1982. halaman 14

Sri Y. Pudyatmoko, , **Pengantar Hukum Pajak Edisi Terbaru**, Andi

Yogyakarta, Yogyakarta, 2009. halaman 38

Suharsimi Arikunto, , **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**,

Rineka cipta, Jakarta,2002. halaman 107

Tunggul Anshari Setia Negara,S.H.,M.Hum, , **Pengantar Hukum Pajak**,

Bayumedia, Malang, 2005.

Undang-Undang, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Data Internet :

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (online), (20 September 2013)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online, (20 September 2013)

PLN (online), (20 September 2013)

Sonny Lazio, **Pengertian dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah** (online), <http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>, (11 September 2013) , 2012.

Febri Greta, **Akuntansi** (online), http://upiypk.ac.id/ejournal/File_Jurnal/09101155110156_FEBRI%20GRETA%20P_AKUNTANSI.pdf , (17 September 2013) , 2009.

Sonny Lazio, **Pengertian dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah** (online), <http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>, (20 September 2013) , 2012.

Trisula Catur Wiwarajagat, **kontribusi** (online), <http://trisulacaturwiwarajagat.jimdo.com/2011/02/06/kontribusi/> (20 September 2013), 2011.

Mahasiswa Abadi, **Sistem, jenis dan tarif pajak (online)**,
<http://anekamakalahkita.blogspot.com/2013/01/sistem-jenis-dan-tarif-pajak.html>, (17 November 2013) , 2013.

Gede Suarnaya, **Pajak Penerangan Jalan**, (online),
<http://gedesuarnaya.com/2011/10/03/311/> , (31 desember 2013) , 2011.